



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KUTASARI
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KUTASARI

Jalan Raya Tobong No. 50 ☎ 0281-6599150

PURBALINGGA 53361



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPd adalah Dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk 1 (satu) tahun anggaran Tahun 2025.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Penjelasan mengenai RKPd tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

RKPd Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| a. BAB I | : PENDAHULUAN; |
| b. BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; |
| c. BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; |
| d. BAB IV | : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; |
| e. BAB V | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; |
| f. BAB VI | : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; |
| g. BAB VII | : PENUTUP |


Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

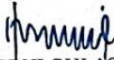
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 JUNI 2024
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 62

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2024, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja OPD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kutasari. Adapun keberhasilan RENJA OPD ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Purbalingga, Juli 2025

CAMAT KUTASARI



CAHYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19720101 199203 1012

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang	20
1.2. Landasan Hukum	23
1.3. Maksud dan Tujuan	26
1.4. Sistematika Penulisan	27
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	28
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari.....	39
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari.....	43
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.....	59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	73
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari	77
3.3 Program dan Kegiatan	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUTASARI	82
BAB V PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.....	29
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	41
Tabel II.3 Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	46
Tabel II.4 Lokus Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari Tahun 2022...47	
Tabel II.5 Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2022	49
Tabel II.6 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Umur Tahun 2022	50
Tabel II.7 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2022.....	50
Tabel II.8 Profile BUMDes Kecamatan Kutasari Tahun 2023.....	51
Tabel II.9 Status Indeks Desa Mandiri Kecamatan Kutasari Tahun 2023	53
Tabel II.10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	57
Tabel II.11 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	70
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2023.....	77
Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kutasari	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dukomen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten.....	49
Gambar 2.1 Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	54
Gambar 2.2 Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kutasari menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

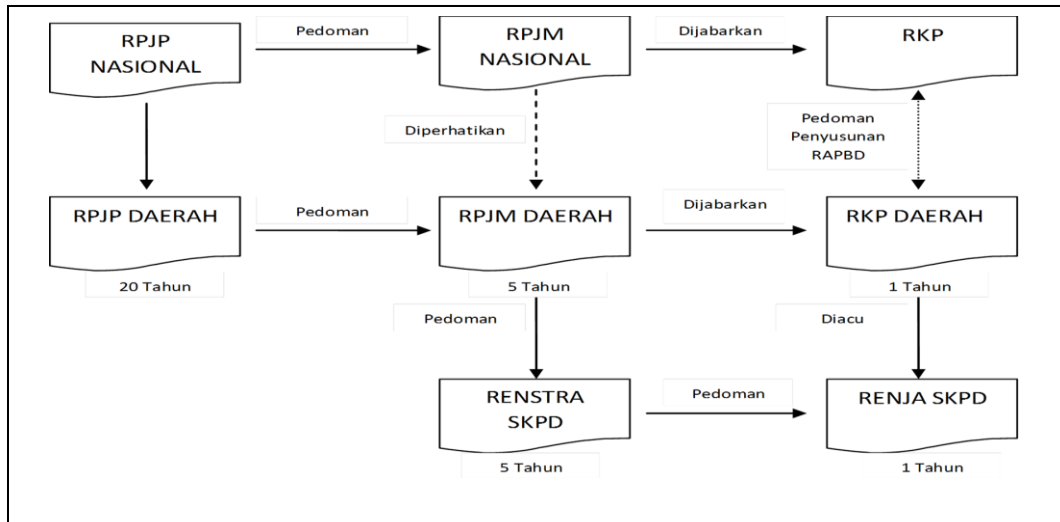
Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kutasari

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari Tahun 2025 ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kutasari Tahun 2025.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kutasari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2025.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari
- 2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KUTASARI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kutasari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kecamatan Kutasari tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan

Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kutasari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari tahun 2023 dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2024
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	7. UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	94,04%	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		pemerintahan daerah								
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
01.2.01.07	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Barang								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
01.2.09.02	UNSUR KEWILAYAHAN		NA	NA			100%			100%
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	3,1-5	3	100%			100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	PELAYANAN PUBLIK									
01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
02.2.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan	NA	NA	12 laporan	3 laporan	25%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	UMUM	Ketertiban Umum								
03.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	100	100 %	1000%	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
05.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	2 desa	2 desa	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutasari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan SK Bupati No. 060/293 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kutasari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kutasari memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

A. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2023 di OPD Kecamatan Kutasari ada realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

A.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan tersebut adalah :

- a) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan/ harus menunggu petunjuk dari tingkat pemerintahan di atasnya
- b) Sarana Prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan
- c) Tidak seimbang nya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi

A.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Kutasari tahun 2021-2026 adalah adanya beberapa program/kegiatan yang tidak sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan timbulnya dampak bencana nasional yaitu pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa progres terkendala hampir disemua seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kutasari. Implikasinya adalah perlu peningkatan secara intensif dibidang Ketertiban dan berkoordinasi supaya dapat meningkatkan pelayanan secara optimal dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru dengan cara yang lebih efektif.

B. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - c. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - e. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - f. Penyediaan bahan logistik kantor
 - g. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - h. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan

B.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan adwal yang telah di tentukan
- b. Sarana penunjang mendukung tercapainya kegiatan
- c. Sumber daya yang ada susah sesuai dengan kondisi kantor.

B.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Kutasari tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kutasari. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
2. Terpenuhinya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin minggu I dan III setiap bulan, melibatkan personil Kecamatan, Lurah, Kepala Desa, UPT

Dinas, Kepala Sekolah, perangkat kelurahan, perangkat desa, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa serta siswa-siswi Prakerin;

14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Lurah, Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
17. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan administrasi desa/ kas opname di 6 desa.
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Kutasari ;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

E. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
2. Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai IKM			86	87	88	89	86	87	88	89	
	Nilai Sakip			62	64	66	68	55,76	63,94	66	68	
A	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	86	87	88	89	
1	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik			3,1	3,2	3,5	4	3,1	3,2	3,5	4	
2	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi			33%	50%	67%	83%	33%	50%	67%	83%	

5	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
B	Nilai SAKIP Kecamatan			62	64	66	68	62	64	66	68	
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Ketersediaan Laporan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan misi Pemerintah Daerah, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah *“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”*. Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan 7 Misi yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenang dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung misi 1 dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, Kecamatan Kutasari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga. Dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Kutasari masih memerlukan peningkatan pelayanan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutasari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Kutasari, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kutasari harus betul-betul

memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun isu – isu penting di wilayah Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut

a. Nilai Sakip

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) pengelolaan data kinerja; (e) pelaporan kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian kinerja. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.2.
Nilai Sakip Kecamatan Kutasari

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	17,70
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	13,75
NILAI TOTAL	55,76

Sumber: Inspektorat Purbalingga, 2022

b. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa. Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil sensus 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Kutasari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel II.3.

Tabel Lokus Penganggulan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari

No	Kecamatan	Desa
1	Kutasari	Candinata
2	Kutasari	Cendana
3	Kutasari	Karangcegak
4	Kutasari	Karangklesem
5	Kutasari	Karangreja
6	Kutasari	Sumingkir

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :

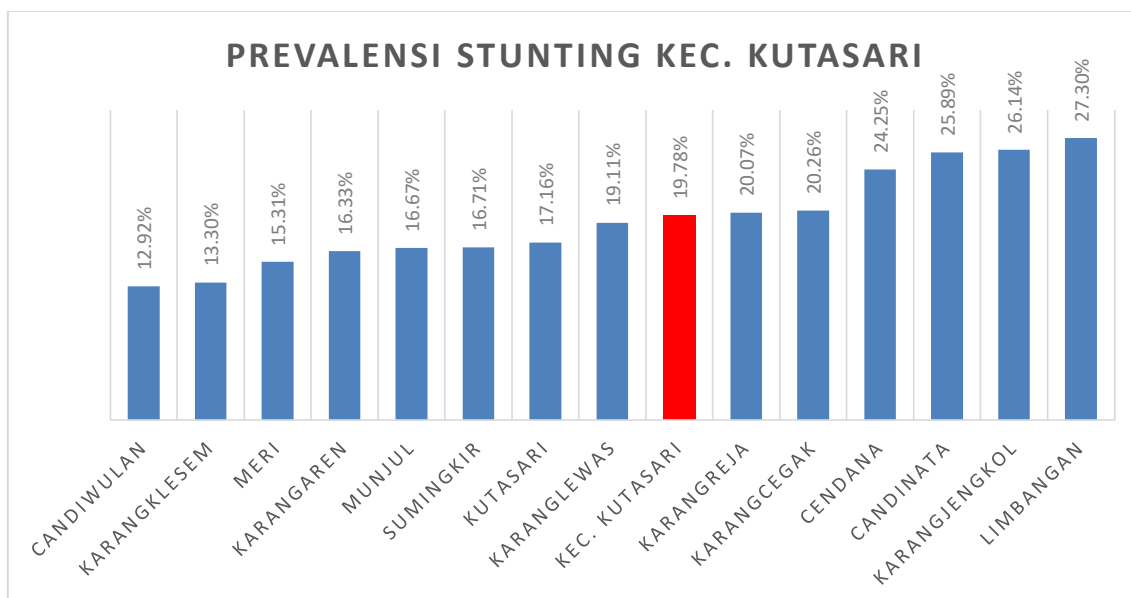
c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

c. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel II.4.
Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KUTASARI	4155	171	651	822	19,78%
CANDINATA	448	24	92	116	25,89%
CANDIWULAN	356	11	35	46	12,92%
CENDANA	367	18	71	89	24,25%
KARANGAREN	98	0	16	16	16,33%
KARANGCEGAK	459	23	70	93	20,26%
KARANGJENGKOL	176	13	33	46	26,14%
KARANGKLESEM	233	6	25	31	13,30%
KARANGLEWAS	157	8	22	30	19,11%
KARANGREJA	299	19	41	60	20,07%
KUTASARI	338	14	44	58	17,16%
LIMBANGAN	348	10	85	95	27,30%
MERI	307	6	41	47	15,31%
MUNJUL	204	9	25	34	16,67%
SUMINGKIR	365	10	51	61	16,71%



Gambar 2.1.
Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Karangreja, Desa Karangcegak, Desa Cendana, Desa Candinata, Desa Karangjengkol, dan Desa Limbangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

d. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel II.5.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Umur

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
425	267	662

Tabel II.6.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
258	379	27

Pada Kecamatan Kutasari terdapat 425 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 267 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 662 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 258 anak, SMP/SMPLB sejumlah 379 anak, SMA/SMALB sejumlah 27 anak, dan tidak sekolah sejumlah 9 anak.

e. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kutasari memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.7.
Profil Bumdes Kecamatan Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mbangun Desa	Jl. Raya Tobong Km. 1 Desa Candiwulan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Perdagangan : -	Tumbuh	Candiwulan, Kutasari
2.	Mangun Reja	Jl. Raya Karangaren Desa Karangaren Rt 5 rw 2, kec. Kutasari Kab. Purbalingga. 53361	Pertanian : took pertanian	Tumbuh	Karangaren, Kutasari
3.	Sumber Makmur	Jl Raya Karangklesem No 6	- Kios/toko : toko alat tulis kantor - Wisata : taman wisata karangklesem - Perikanan : budidaya ikan air tawar	Tumbuh	Karangklesem, Kutasari
4.	Maju Makmur	Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari	Persewaan : sewa kios/toko	Dasar	Karangcegak, Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
		Kabupaten Purbalingga			
5.	Mbangun Desa	Desa Candiwulan, RT 02/RW 01, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga 53361	Perdagangan : rumah tangga, alat tulis	Dasar	Candiwulan, Kutasari
6.	Mukti Rahayu	Sumingkir RT 03 RW 02	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan : pasar desa - Pertanian : budidaya talas benang - Peternakan : penggemukan sapi - Persewaan : sewa sarana olahraga (gedung) 	Tumbuh	Sumingkir, Kutasari

f. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel II.8.
Status IDM Kecamatan Kutasari Tahun 2024

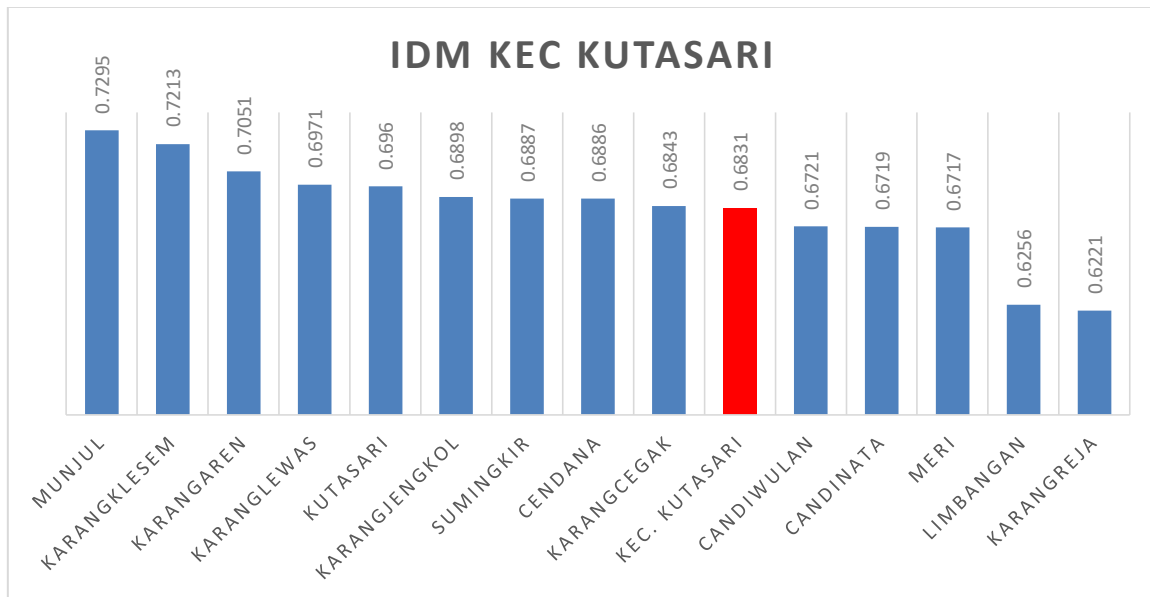
Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
Kutasari	3303072013	Candinata	0,76	0,55	0,8667	0,7256	Maju
Kutasari	3303072011	Candiwulan	0,7829	0,7	0,9333	0,8054	Maju
Kutasari	3303072010	Cendana	0,7543	0,4667	0,8	0,6737	Berkembang
Kutasari	3303072008	Karangaren	0,7657	0,5	0,9333	0,733	Maju

Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
Kutasari	3303072012	Karangcegak	0,8114	0,65	0,8667	0,776	Maju
Kutasari	3303072014	Karangjengkol	0,7029	0,5667	0,9333	0,7419	Maju
Kutasari	3303072006	Karangklesem	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	Maju
Kutasari	3303072001	Karanglewas	0,8857	0,7833	0,8	0,823	Mandiri
Kutasari	3303072007	Karangreja	0,8057	0,65	0,8	0,7519	Maju
Kutasari	3303072005	Kutasari	0,8	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
Kutasari	3303072009	Limbangan	0,7714	0,5833	0,8	0,7183	Maju
Kutasari	3303072004	Meri	0,8	0,5833	0,9333	0,7722	Maju
Kutasari	3303072002	Munjul	0,7714	0,7176	0,9333	0,8071	Maju
Kutasari	3303072003	Sumingkir	0,7943	0,7333	0,6	0,7092	Maju

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Cendana dan Karangjengkol, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Cendana, Meri dan Karangaren, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Sumingkir.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Karanglewas, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karanglewas dan Desa Karangklesem, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Munjul, Meri, Karangaren, Desa Candiwulan , dan Desa Karangjengkol. Terdapat 11 desa dengan status maju, dan 1 desa berkembang dan 2 Desa mandiri.



Gambar 2.2.
Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2022

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Candiwulan, Desa Candinata, Desa Meri, Desa Limbangan, dan Desa Karangreja. Sementara 9 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Munjul, Desa Karangklesem, Desa karangaren, Desa Karanglewas, Desa Kutasari, Desa Karangjengkol, Desa Sumingkir, Desa Cendana, dan Desa Karangcegak.

g. **Perkembangan Kebangkitan Perekonomian di Wilayah Kecamatan Kutasari Pasca Covid**

Perekonomian di wilayah Kecamatan Kutasari pasca covid sudah mulai bangkit. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai garda terdepan pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai berkembang. Salah satunya adalah UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi,

di mana UMKM dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, pendapatan dan mempunyai peran menyerap tenaga kerja. Dari sektor wisata juga sudah mulai berjalan normal di mana dengan dibukanya kembali objek wisata dapat menumbuhkan perekonomian khususnya bagi pelaku usaha / pedagang di sekitar lokasi wisata.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kutasari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai perwujudan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kutasari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kutasari sesuai dengan Sistem Pusat Keegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan,

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kutasari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.9.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Kecamatan Kutasari

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			1.691.282.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.691.282.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		1.285.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		1.285.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian	2 dokumen	660.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalia	2 dokumen	660.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun					n Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.416.516.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.416.516.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.394.486.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.394.486.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	17 Orang	6.530.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	17 Orang	6.530.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	
7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	600.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		19.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		19.200.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	2.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD			
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	2.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	2.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.161.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			159.161.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	131.592.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	131.592.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.540.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			94.540.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atau Lapangan					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				124.151.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			124.151.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		75.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		75.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	123.151.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	123.151.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		1.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			75.300.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		75.300.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		75.300.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.700.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			25.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			25.700.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kali	23.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kali	23.700.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			21.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			21.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kasus konflik horisontal		21.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kasus konflik horisontal		21.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	21.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	6 kegiatan	21.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			0000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	
					1.853.909.000					1.853.909.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kutasari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Kutasari tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.10.
Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Karanglewas RT 05 RW 02	DINPORAPAR
	Pembangunan Bendungan Irigasi	Desa Karanglewas Dusun 1 RT 01 RW 01	DPU_PR
	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Karanglewas RT.01 RW.01	DLH
2	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Munjul Rt.15 Rw.08 dan Rt.16 Rw.08 sampai dengan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pelebaran jalan kabupaten	Desa Munjul Rt.12 Rw.06	DPU-PR
	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan	Desa Munjul	DINDIK
	Bantuan Peralatan Usaha Mikro	Desa Munjul	DINKOP UMKM
3	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Kutasari Dusun I dan II RT 16, 17, 18 & 19	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Kutasari Dusun V RT 02 RW 01	DINHUB
	Penyuluhan Pelatihan UMKM	Desa Kutasari	DINKOP UMKM
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Kutasari	DINPERMASDES
4	Pelebaran jembatan kabupaten sungai gemuruh	Desa Karangklesem RT 08 RW 03	DPU-PR
	pembangunan jembatan kabupaten sungai krejo	Desa Karangklesem RT 03 RW 01	DPU-PR
5	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 5 RT 2 RW 1	DPU-PR
	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 4 dan 5	DPU-PR
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sumingkir Dusun Binangun RT.02 RW.01	DIPERTAN
6	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Karangreja Dusun 3, 4, dan 5	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DPU-PR
	Penguatan Kelembagaan/Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DINSOSDALDUK
	Bantuan Bibit kambing/sapi	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DIPERTAN

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
7	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Karangaren RT 05 RW 02 DUSUN 02	DPU-PR
	Pembangunan DAM	Desa Karangaren RT 05 RW 02 Dusun 02	DPU-PR
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Pemuda	Desa Karangaren	DINPORAPAR
	Pelatihan Kearsipan Desa	Desa Karangaren	DINARPUS
8	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jtitut jides)	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DINPERTAN
	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DPU-PR
	Kerjsama pelatihan dengan desa dan BLK	Desa Limbangan	DINNAKER
9	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Cendana-Purwadadi,	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung PAUD	Desa Cendana	DINDIK
	Pelatihan Pengembangan kelompok bidang budidaya pertanian/peternakan	Desa Cendana	DIPERTAN
	Pengadaan Alat Kesenian	Desa Cendana	DINDIK
10	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Meri - Karangcegak	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Meri	DINHUB
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Meri	DINPERMASDES
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Meri	DINPERTAN
11	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Candiwulan Rt 07 rw 04	DINPORAPAR
	penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Balaidesa Candiwulan Rt 001 Rw 001	DIKOPUMKM
	Pelebaran Jalan Kabupaten RTLH	Desa Candiwulan RT.01/RW.02 Desa Candiwulan	DPU-PR DINRUNKIM
12	Pembangunan drainase jalan kabupaten Karangcegak s/d Candinata	Sepanjang Jalan Kabupaten, Desa Karangcegak menuju Desa Candinata dan dari Desa Karangcegak menuju Desa Metenggeng Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Raya Karangcegak Candinata , Kab. Purbalingga	DINHUB
	Bantuan bibit kambing/sapi/domba/ungags	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 5	DIPERTAN

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pelatihan Bidang perikanan	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 3	DKPP
13	Pemeliharaan jalan kabupaten Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa RTLH Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Candinata Dusun 1,3,4,5 Desa Candinata RT005 RW003 Desa Candinata Dusun 1 sd 5 Desa Candinata	DPU-PR DINPERMASDES DINRUNKIM DINPERMASDES
14	Pembangunan drainase jalan kabupaten Pembangunan jalan kabupaten Bantuan Bibit kambing/sapi/domba/ungags Bantuan peralatan kepada usaha mikro Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Karangjengkol Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Karangjengkol Dusun 5 Desa Karangjengkol RT.10/RW.3 Desa Karangjengkol Desa Karangjengkol	DPU-PR DPU-PR DINPERTAN DINKOP UMKM DINPERMASDES

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu *“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”*.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih. Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk **“Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia”**.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;

- iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kutasari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Kutasari.

Dengan menitikberatkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2024	Satuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	
2		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP OPD	65	
3		Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	89	

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutasari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;

3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Meubelair;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel IV.1.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah			1.644.527.000				1.644.527.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		100%	1.265.000			100%	4.040.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	2 dokumen	660.000	DAU		2 dokumen	2.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 dokumen	605.000	DAU		4 dokumen	1.280.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti							1.353.606.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	11 PNS	1.249.645.000	DAU		11 PNS	1.300.846.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan /SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	25	6.530.000	DAU			8.180.000
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	15.500.000	DAU		4 bln	44.580.000
7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah			600.000				2.700.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Terlaksananya penatausahaan barang		12 bln	600.000			12 bln	2.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD	milik daerah pada SKPD							
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor							40.171.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	1.000.000	DAU		12 bln	2.731.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	12.000.000	DAU		12 bln	21.020.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	2.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	7.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	2.200.000	DAU		4 bln	7.420.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pada SKPD								
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		0	DAU			5.000.000
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebel untuk kantor (Lemari Berkas)	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		0	DAU			5.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153.227.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	300.000				150
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		26.260.000	DAU			26.685.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			1.000.000				2.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		124.392.000	DAU			124.392.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			85.783.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		87.780.000	DAU			63.188.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		2.760.000	DAU			8.220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)			4.000.000				14.375.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			27.773.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			24.369.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan			98.151.000				24.369.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan			1.000.000				3.404.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		1.000.000	DAU			3.404.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase keaktifan lembaga desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			88.504.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi							88.504.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Kutasari		16.000.000	DAU			41.459.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		59.300.000	DAU			47.045.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan							39.655.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga				DAU		39.655.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12 bulan	23.700.000				32.455.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kecamatan								
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bulan	2.000.000		DAU		7.200.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan							38.145.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kasus Konflik horisontal							38.145.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	12 bulan		21.000.000				38.145.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			0				15.305.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				0				15.305.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi			0				15.305.000
									1.853.909.000

TABEL KE
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KUTASARI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KUTASARI

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
				Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1			
					Sebelum					Sesudah								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)				
KECAMATAN KUTASARI																		
7				UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 1.832.79 1.000				Rp. 1.832.79 1.000	Rp. 1.724.65 4.000	Rp. 2.100. 000			Rp. 1.726.754 .000	Rp. 2.251.500. 000,00
7	0 1			KECAMATAN				Rp. 1.832.79 1.000				Rp. 1.832.79 1.000	Rp. 1.724.65 4.000	Rp. 2.100. 000			Rp. 1.726.754 .000	Rp. 2.251.500. 000,00
7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 1.683.86 5.000				Rp. 1.683.86 5.000	Rp. 1.611.28 9.000	Rp. 2.100. 000			Rp. 1.613.389 .000	Rp. 1.900.500. 000,00

7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 10.000.000							Rp. 10.000.000	Rp. 4.055.000					Rp. 4.055.000	Rp. 4.000.000,00	
7	0	0	2	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000								Rp. 6.000.000	Rp. 1.912.000					Rp. 1.912.000	Rp. 2.500.000,00
7	0	0	2	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000								Rp. 4.000.000	Rp. 2.143.000					Rp. 2.143.000	Rp. 1.500.000,00
7	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 1.371.224.000								Rp. 1.371.224.000	Rp. 1.317.502.000					Rp. 1.317.502.000	Rp. 1.528.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 1.341.694.000								Rp. 1.341.694.000	Rp. 1.289.262.000					Rp. 1.289.262.000	Rp. 1.500.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 7.530.000								Rp. 7.530.000	Rp. 6.340.000					Rp. 6.340.000	Rp. 10.000.000,00
7	0	0	2	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 22.000.000								Rp. 22.000.000	Rp. 21.900.000					Rp. 21.900.000	Rp. 18.000.000,00
7	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 1.800.000								Rp. 1.800.000	Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 3.000.000,00
7	0	0	2	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 1.800.000								Rp. 1.800.000	Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 3.000.000,00
7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 31.000.000								Rp. 31.000.000	Rp. 19.352.000					Rp. 19.352.000	Rp. 33.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000								Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000,00

7	0	0	2	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 17.000.000			Rp. 17.000.000	Rp. 12.702.000			Rp. 12.702.000	Rp. 15.000.000,00
7	0	0	2	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 3.000.000			Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 4.000.000			Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000			Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000,00
7	0	0	2	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 6.000.000			Rp. 6.000.000	Rp. 1.650.000			Rp. 1.650.000	Rp. 4.000.000,00
7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 500.000			Rp. 500.000	Rp. 0	Rp. 2.100.000		Rp. 2.100.000	Rp. 25.000.000,00
7	0	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000			Rp. 500.000	Rp. 0	Rp. 2.100.000		Rp. 2.100.000	Rp. 25.000.000,00
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 166.161.000			Rp. 166.161.000	Rp. 165.000.000			Rp. 165.000.000	Rp. 182.500.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 300.000			Rp. 300.000	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 500.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 30.269.000			Rp. 30.269.000	Rp. 30.364.000			Rp. 30.364.000	Rp. 28.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000	Rp. 500.000			Rp. 500.000	Rp. 4.000.000,00
7	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	Rp. 134.592.000			Rp. 134.592.000	Rp. 134.136.000			Rp. 134.136.000	Rp. 150.000.000,00

7	0	0								Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	3								53.000.00						53.000.00	40.331.00				40.331.00	85.000.000,00	
7	0	0	2,							Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	3	01							53.000.00						53.000.00	40.331.00				40.331.00	85.000.000,00	
7	0	0	2,	00						Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	3	01	01						18.000.00						18.000.00	13.330.00				13.330.00	25.000.000,00	
7	0	0	2,	00						Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	3	01	03						35.000.00						35.000.00	27.001.00				27.001.00	60.000.000,00	
7	0	0								Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	4								36.865.00						36.865.00	33.593.00				33.593.00	29.000.000,00	
7	0	0	2,							Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	4	01							36.865.00						36.865.00	33.593.00				33.593.00	29.000.000,00	
7	0	0	2,	00						Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	4	01	01						28.000.00						28.000.00	25.793.00				25.793.00	25.000.000,00	
7	0	0	2,	00						Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	4	01	02						8.865.00						8.865.00	7.800.00				7.800.000	4.000.000,00	
7	0	0								Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	5								27.561.00						27.561.00	24.561.00				24.561.00	50.000.000,00	
7	0	0	2,							Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	5	01							27.561.00						27.561.00	24.561.00				24.561.00	50.000.000,00	
7	0	0	2,	00						Rp.						Rp.	Rp.				Rp.	Rp.	
1	1	5	01	03						27.561.00						27.561.00	24.561.00				24.561.00	50.000.000,00	

7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 15.500.0 00				Rp. 15.500.0 00	Rp. 7.350.00 0			Rp. 7.350.000	Rp. 60.000.000 ,00
7	0	0	2,		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 15.500.0 00				Rp. 15.500.0 00	Rp. 7.350.00 0			Rp. 7.350.000	Rp. 60.000.000 ,00
7	0	0	2,	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingg a, Kertanega ra, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.0 00				Rp. 15.000.0 00	Rp. 7.350.00 0			Rp. 7.350.000	Rp. 30.000.000 ,00
7	0	0	2,	00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Purbalingg a, Kutasari, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 30.000.000 ,00
Jumlah									Rp. 1.832.79 1.000				Rp. 1.832.79 1.000	Rp. 1.724.65 4.000	Rp. 2.100. 000		Rp. 1.726.754 .000	Rp. 2.251.500. 000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kutasari pada Tahun 2025.

Kecamatan Kutasari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutasari Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kutasari.

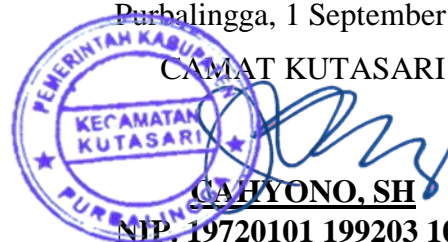
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga, 1 September 2025

CAMAT KUTASARI



CALYONO, SH

NIP. 19720101 199203 1012

LAMPIRAN 1
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN KECAMATAN KUTASARI

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtram	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtram	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkong												

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Masyarakat												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentramanan yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtram	Kurang pemahamannya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtram	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	- Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtram	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

Matriks Lembar Kerja
Gender Analysis Pathway (GAP) Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga/Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN
	NAMA OPD		KECAMATAN KUTASARI
	PROGRAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KEGIATAN		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
	SUB KEGIATAN		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk kecamatan Kutasari sebanyak 69.417 jiwa, dengan rincian Laki-laki 35.383 jiwa dan Perempuan 34.034 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kutasari rata-rata 33 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Kutasari yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 14 orang, BPD 14 orang, perwakilan perempuan 28 orang, tidak ada keterwakilan disabilitas, tidak ada keterwakilan anak, tokoh masyarakat 13 orang, PKK kecamatan 3 orang
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di Kecamatan Kutasari sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat. • Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Kutasari yang kerap muncul antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya keterwakilan perempuan 2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender 3. Norma sosial yang membatasi

			<p>4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan</p> <p>5. Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidakadilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakadilan dalam akses informasi 2. Ketidakadilan dalam partisipasi 3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) 5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) 6. Ketidakadilan sosial dan kultural 7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender.
		Sebab Kesenjangan Internal	<p>Kesenjangan internal pada musrenbangcam antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesenjangan dalam partisipasi 2. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan 3. kesenjangan dalam akses terhadap informasi 4. kesenjangan dalam prioritas pembangunan 5. kesenjangan dalam akses ke dana pembangunan 6. kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan 7. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>Kesenjangan Eksternal pada musrenbangcam antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan akses terhadap sumberdaya dan dana pembangunan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 2. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas 3. ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi 4. ketergantuan terhadap bantuan luar
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyelenggara musrenbang 2. Penyusunan surat edaran pelaksanaan musrenbang kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya 3. Pra musrenbang/ desk/ rapat untuk menyusun prioritas usulan 4. Pelaksanaan musrenbang

		5. Evaluasi pelaksanaan
BARIS 6	BASELINE DATA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk kecamatan Kutasari sebanyak 64199 jiwa, dengan rincian Laki-laki 32737 jiwa dan Perempuan 31462 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan KUTASARI rata-rata 33 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Kutasari yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 14 orang, BPD 14 orang, perwakilan perempuan 28 orang, tidak ada keterwakilan disabilitas, tidak ada keterwakilan anak, tokoh masyarakat 13 orang, PKK kecamatan 3 orang
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang Target Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Lembaga ▪ 28 Peserta dari unsur perempuan
		Immediate Outcome/Kegiatan Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100 %
		Intermediate Outcome/Program Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja : 100 %
		Optimum Outcome/Sasaran Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan Target Kinerja: 88
		Dampak/Tujuan Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Target Kinerja: 38

CAMAT KUTASARI

CAHYONO, S.H

NIP 19720101 1992031012
 LEMBAR KERJA
 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN KUTASARI
 KABUPATEN PURBALINGGA/PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN
	NAMA OPD		KECAMATAN KUTASARI
	PROGRAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
	KEGIATAN		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
	SUB KEGIATAN		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	TUJUAN SUB BIDANG		Terlaksananya pembinaan persatuan dan Kesatuan bangsa
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan Paskibra (Pelatih 5 orang, Peserta 55 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 15 orang perempuan, Upacara peringatan hari besar nasional (peserta 140 orang laki-laki dan 160 orang perempuan)
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<p>Pelatihan Paskibra (Pelatih 5 orang, Peserta 55 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 15 orang perempuan, Upacara peringatan hari besar nasional (peserta 140 orang laki-laki dan 160 orang perempuan)</p> <p>Ketidakadilan dalam kegiatan paskibra dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali didorong oleh bias gender, perbedaan perlakuan, atau ekspektasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kegiatan paskibra bertujuan untuk mendidik disiplin , kerjasama tim dan semangat nasionalisme, relitas dilapangan tidak selalu mencerminkan kesetiaan yang ideal.</p> <p>Budaya dan kebijakan memiliki peran yang besar dalam menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan pasibra.</p>

			<p>Budaya yang masih kuat dengan stereotip gender dan nilai-nilai patriarki seringkali membatasi perempuan, sementara kebijakan yang inklusif dapat membantu membuka peluang bagi perempuan dapat berpartisipasi secara setara</p> <p>Paskibra tingkat kecamatan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan pemuda-pemudi dalam pengibaran bendera pada upacara kenegaraan, menghadirkan beberapa aspek penting terkait relasi gender seperti partisipasi, dan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan</p>
		Sebab Kesenjangan Internal	Faktor internal yang mendukung responsif gender dalam kegiatan paskibra mencakup kebijakan yang adil, budaya organisasi yang inklusif, pelatihan yang merata dan hubungan yang baik antar anggota
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Faktor eksternal memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang responsif gender dalam paskibra, dengan adanya kebijakan yang mendukung, pengaruh budaya yang positif, dukungan dari berbagai organisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan dan sektor swasta, partisipasi perempuan dalam paskibra dapat ditingkatkan
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan keikutsertaan orang dalam kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia 2. Seleksi anggota paskibra 3. Pelatihan Paskibra 4. Gladi bersih paskibra 5. Pelaksanaan paskibra 6. Evaluasi pelaksanaan
BARIS 6	BASELINE DATA		Pelatihan Paskibra (Pelatih 5 orang, Peserta 55 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 15 orang perempuan, Upacara peringatan hari besar nasional (peserta 140 orang laki-laki dan 160

			orang perempuan)
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Target Kinerja: 12 laporan
		Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah potensi konflik yang dilaporkan Target Kinerja: 12 laporan
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Jumlah potensi konflik yang dilaporkan Target Kinerja : 12 laporan
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target Kinerja: 88 nilai
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 88 nilai

CAMAT KUTASARI

CAHYONO, S.H
NIP 19720101 1992031012



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KUTASARI

Jl.Raya Tobong No. 50
PURBALINGGA 53661

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

TAHUN 2024

NAMA OPD : KECAMATAN KUTASARI

URUSAN YANG DIAMPU: KEWILAYAHAN

KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
SUB KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Data Pilar Gender Isu- isu gender</p> <ul style="list-style-type: none">• Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan Kutasari sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat.• Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Kutasari yang kerap muncul antara lain :<ol style="list-style-type: none">1. Minimnya keterwakilan perempuan2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender3. Norma sosial yang membatasi

	<p>4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan</p> <p>5. Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidakadilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakadilan dalam akses informasi 2. Ketidakadilan dalam partisipasi 3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) 5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) 6. Ketidakadilan sosial dan kultural 7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender. 	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	Rencana Tindak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp. 16.000 000,-
	<i>SDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta 80 Orang • Jumlah Panitia 6 Orang
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • LCD Projector • Buku Catatan • Laptop • Soundsystem
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum 	

	<p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang <p>Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Lembaga ▪ 28 Peserta dari unsur Perempuan
Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>100%</p>
Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Persentase keaktifan Lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>100%</p>
Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>88</p>
Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>38</p>

Kutasari, 09 Oktober 2024

KECAMATAN KUTASARI

CAHYONO,S.H

NIP. 19720101 1992031012



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KUTASARI

Jl.Raya Tobong No. 50
PURBALINGGA 53661

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

TAHUN 2024

NAMA OPD : KECAMATAN KUTASARI

URUSAN YANG DIAMPU: KEWILAYAHAN

KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
SUB KEGIATAN	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Pelatihan Paskibra (Pelatih 5 orang, Peserta 55, 40 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, Upacara peringatan hari besar nasional (peserta 140 orang laki-laki dan 160 orang perempuan)</p> <p>Ketidakadilan dalam kegiatan paskibra dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali didorong oleh bias gender, perbedaan perlakuan, atau ekspektasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kegiatan paskibra bertujuan untuk mendidik disiplin , kerjasama tim dan semangat nasionalisme, relitas dilapangan tidak selalu mencerminkan kesetiaan yang ideal.</p> <p>Budaya dan kebijakan memiliki peran yang besar dalam menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan pasibra. Budaya yang masih kuat dengan stereotip gendr dan nilai-nilai patriarki seringkali membatasi perempuan, sementara kbijakan yang inklusi dapat membantu membuka peluang bagi</p>

	<p>perempuan dapat berpartisipasi secara setara</p> <p>Paskibra tingkat kecamatan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan pemuda pemudi dalam pengibaran bendera pada upacara kenegaraan, menghadirkan beberapa aspek penting terkait relasi gender seperti partisipasi, dan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan</p>	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	Rencana Tindak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Pembentukan panitia 2. Seleksi anggota pasibra 3. Pelatihan Paskibra 4. Gladi bersih paskibra 5. Pelaksanaan paskibra 6. Evaluasi pelaksanaan
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp. 21.000 000,-
	<i>SDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta 55 Orang • Jumlah Panitia 5 Orang
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan • Tiang bendera • Soundsystem, Trtag • Naji seragam
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p> <p>Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 orang 	
Immediate	Indikator Kinerja:	

Outcome/Kegiatan	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan Target Kinerja : 60 orang
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Jumlah potensi konflik yang dilaporkan Target Kinerja : 12 laporan
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target Kinerja : 88 nilai
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja : 88 nilai

Kutasari, 09 Oktober 2025

KECAMATAN KUTASARI



CAHYONO,S.H

NIP. 19720101 1992031012